

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzi, Wetria, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang.
- Fuady, Munir, 2009, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ganie, A. Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunanto, 2000, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Abdul, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, Said Sampara, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta
- Lontoh, Rudhy A *et al.*, 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, PT. Alumni, Bandung.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Sastrawidjaja, Suparman, 1997, *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatno, R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Vandawati, Zahry, 2013, *Risiko dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Reyka Petra Media, Surabaya.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H, 2021, *Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

- Bappenas, “Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Ancaman Resesi Dunia Akibat Pandemi, Triwulan I Tahun 2020”, *Bappenas*, Vol. 4, No. 1 Mei 2020, hlm. 1-86.
- Budiyono, Tri, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 3, Juli 2021, hlm. 232-243.
- Djafri, Ahmad, “Implikasi Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi”, *Pamulang Law Review*, Vol. 1, Issue 1, Agustus 2018, hlm. 43-52.
- Fauzi, Wetria “Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”, *Jurnal ADHAPER*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 75-91.
- Fitri, Sherly Nelsa, Adi Sulistiyono, dan Yudho Taruno Muryanto, “The Effectiveness of Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or PKPU) to Avoid the Debtor’s Bankruptcy (Law Number 37 of 2004)”, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. III, Issue. II, Februari 2019, hlm. 274-279.
- Haq, M. Bagas Amirul dan Tata Wijayanta, “Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea”, *International Jurnal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 14, Issue 12, 2020, hlm. 715-729.
- Indonesia Financial Group, “Kinerja Asuransi Jiwa Indonesia di Era Covid-19”, *Economic Bulletin*, 28 Oktober 2021, hlm. 1-15.
- Indonesia Re, “Peran Industri Asuransi sebagai Pilar Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Reinfokus Media Informasi Asuransi dan Reasuransi*, Edisi September 2021, hlm. 1-44.
- Kementerian PPN/Bappenas, “Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020”, Edisi Vol. 4, No. 3, November 2020, hlm. 1-106.
- Maulidi, M. Agus, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 340-362.
- Pahlevi N, Andi Muhammad Reza dan Fandi Ramadhan, “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm. 179-194.

Otoritas Jasa Keuangan, “Mempercepat Pemulihan, Menjaga Stabilitas”, *OJK Financial Stability Review*, No. 05, 2021, hlm 1-86.

Putra, Farih Romdoni, “Reform of Plan Termination in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 36, No. 3, September 2021, hlm 639-662.

Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm. 482-497.

Singadimedja, Holyness N., Rai Mantili, dan Ema Rahmawati, “The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice”, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 506-526.

Solaiman, Adji Assyafei, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, hlm. 52-66.

Sunarmi, Dedi Harianto, dan T. Keizerina Devi Azwar, “Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 4, Oktober 2016, hlm. 30-39.

Syahrani, M. Alifashil dan Marwanto, “Pertanggungjawaban dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11, Tahun 2020, hlm. 1806-1815.

Wantu, M. Fence, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm. 479-489.

_____, “Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, Juni 2013, hlm. 205-218.

Wijayanta, Tata, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, hlm. 330-346.

_____, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

_____, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 217-226.

_____, “Deadline Settlement of Petition for Declaration of Bankruptcy Before The Commercial Court and The Legal Consequences According to Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vo. 7, No. 3, September-Desember 2018, hlm. 519-533.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Nasution, Annisa Silvia Oktora, 2020, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016.K/Pdt.SUS-PAILIT/2016), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Romadhona, Dika Istikhomah, 2014, *Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit bagi Perusahaan Asuransi berkaitan dengan Perlindungan Hukum Nasabah*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Suryani, Dena, 2021, *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi yang bukan diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Perkara Putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Wantu, Fence M., 2011, *Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

Eqqi Syahputra, “Klaim Covid-19 dari Asuransi Jiwa Capai Rp8,82 T”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220309135037-17-321349/klaim-covid-19-dari-asuransi-jiwa-capai-rp-882-t>, diakses 8 April 2022.

Fitria Novia Heriani, “Jiwasraya Dimohonkan PKPU, Kuasa Hukum: Melanggar UU Kepailitan”, <https://m.hukumonline.com/berita/a/jiwasraya-dimohonkan-pkpu--kuasa-hukum--melanggar-uu-kepailitan-lt6008cf77a8855?page=3>, diakses 25 Februari 2022.

Jeco Siahaan, “Pengajuan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi oleh Nasabah: Terobosan Hukum atau Pelanggaran Hukum?”, <https://bahasan.id/pengajuan-pkpu-terhadap-perusahaan-asuransi-oleh-nasabah-terobosan-hukum-atau-pelanggaran-hukum/>, diakses 8 Februari 2022.

Hamalatul Qur’aini, “MA Cabut Larangan Kreditor Separatis Ajukan PKPU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-cabut-larangan-kreditur-separatis-ajukan-pkpu-lt5eb12c9daf105/?page=all>, diakses 8 Februari 2022.

Ihya Ulum Aldin, “Covid-19 Pukul Industri Asuransi, Bagaimana Pemulihannya?”, <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/60a99b9a19acb/covid-19-pukul-industri-asuransi-bagaimana-peluang-pemulihannya>, diakses 2 Februari 2022.

Mochamad Januar Rizki, “Relasi Krisis Akibat Pandemi terhadap Peningkatan PKPU dan Kepailitan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/relasi-krisis-akibat-pandemi-terhadap-peningkatan-pkpu-dan-kepailitan-lt6130d0d1a0fe0?page=all>, diakses 8 April 2022.

Newswire, “OJK: Peminat Asuransi Turun, tapi Klaim Meningkat selama Pandemi Covid-19”, <https://finansial.bisnis.com/read/20210611/215/1404065/ojk-peminat-asuransi-turun-tapi-klaim-meningkat-selama-pandemi-covid-19>, diakses 16 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Staadblad*. 1847-23.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6274).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-001/PUU-III/2005, perihal permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal pembatalan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) antara Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida Oesman, Tan Surjani, Jo Giok Bwee sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap Lukman Wibowo dan PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai Termohon Kasasi.

Putusan Nomor Perkara 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021, perihal putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) antara Lukman Wibowo sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai Termohon PKPU.